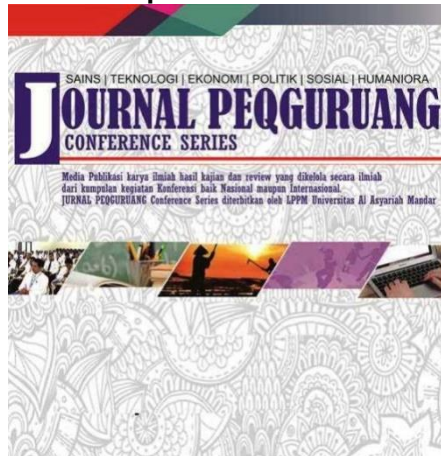


Graphical abstract



UPAYA MEWUJUDKAN PROFESIONALISME KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

¹Ratnayanti, ² Muhammad Massyat, ³Andriani
¹Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author
ratnaeen73@gmail.com

Abstract

The study is aimed at finding out how the work done by the DPRD Mamasa district's of the state's civil personnel relations project will be carried out in accordance with the work of the government and the factors affecting the professional labor force. In this study writers use qualitative approaches and descriptive methods, to collect research data of authors for direct observation, interviews, and documentation. The results show that efforts to improve the professionalism of the working apparatus of the mamasa district's secretarial office are under a very poor category, as shown by all the research indicators of competence, effectiveness, efficiency and responsibility.

Keywords: *Professionalism, Work, Apparatus*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa dalam mewujudkan profesionalisme kerja Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa serta faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme kerja aparat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, untuk mengumpulkan data penelitian penulis melakukan observasi langsung, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya meningkatkan profesionalisme kerja Aparat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa berada pada kategori kurang baik hal ini terlihat dari semua indikator penelitian yaitu kompetensi, efektivitas, efisiensi dan tanggung jawab.

Kata Kunci: *Profesionalisme, Kerja, Aparat*

Article history

DOI: <https://dx.doi.org/10.35329/jp.v2i2.1221>

Received: 17 Agustus 2020 | Received in revised form: 20 September 2020 | Accepted: 28 Oktober 2020

1. PENDAHULUAN

Dalam peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi kepada dewan perwakilan rakyat daerah, maka dipandang perlu untuk membentuk Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa. Yang didalamnya terdapat pelayanan administrasi kesekretariatan, penyelenggaraan administrasi keuangan, dan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam kegiatan kesekretariatan DPRD perlu untuk diketahui tentang tugas yang dilakukan dan pelayanan dewan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, adapun kegiatan kesekretariatan yaitu tata usaha, risalah rapat hukum perundang-undangan dan kegiatan humas serta publikasi.

Pegawai merupakan tenaga kerja manusia yang menggunakan mental dan pikiran dalam melakukan pekerjaannya dan selalu dibutuhkan dalam bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Pegawai tidak hanya bekerja pada lembaga pemerintahan saja tapi pada bidang-bidang usaha yang lain (Widjaja A.W., 2006). Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menjelaskan jenis Pegawai ASN, terdiri dari:

a. PNS

b. PPPK

ASN merupakan Aparatur Sipil Negara dalam pengabdianya terhadap negara diterapkan dalam pelayanan masyarakat namun tidak sesuai dengan realita yang ada tentang sikap disiplin, jujur, adil, transparan serta akuntabel belum terlaksana secara maksimal, maka dari itu untuk meningkatkan kinerja ASN pemerintah menegaskan tentang larangan dan kewajiban yang harus di lakukan oleh ASN sesuai dengan PP No. 53 tahun 2010. Aparatur pemerintah wajib untuk mengemban amanah pada pekerjaan dan mempertanggung jawabkannya (Kurniawan Agung, 2005).

Profesionalisme merupakan pilar dan parameter bagi pemerintah dalam kecakapan aparatur untuk bekerja secara optimal, profesionalisme ini dapat diukur dengan melihat pertanggung jawaban, efisensi, efektifitas, serta mampu berkompetisi (Sedarmayanti, 2010). Selain itu Profesionalisme adalah tentang sikap, ada beberapa hal yang dapat dilihat pada seorang yang memiliki sikap profesionalisme antara lain, pemberian pelayanan dan mementingkan umum, mempunyai keterampilan tinggi, pengawasan ketat dalam bekerja, memiliki sistem balas jasa sebagai lambang prestasi kerja (Andreas Harefa, 2004).

Upaya merupakan tugas pokok yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh seseorang (Peter Salim dan Yeni Salim, 2005). Poerwadarminta mengartikan bahwa upaya adalah proses penyampaian maksud, akal, serta iktiar. Aparatur negara mempunyai kemampuan dalam menjawab semua hal-hal yang serba baru seperti perkembangan, tuntutan, dan pengetahuan agar aparatur tidak tertinggal dalam menjalankan tugasnya (Hamalik Oemar, 2000).

Dari observasi yang dilakukan dan informasi yang didapatkan dari berbagai pihak tentang beberapa

indikasi di Kabupaten Mamasa yang menunjukkan belum terlaksananya profesionalisme kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa, hal tersebut dapat dilihat dengan peran para pegawai negeri sipil yang masih kurang dalam kedisiplinan waktu seperti datang terlambat, tidak ikut apel pagi, dan bolos kerja, tidak melaksanakan tugas dan fungsi bagian sesuai perundang-undangan, serta tidak menjalankan peraturan pemerintah tentang fungsi kesekretariatan yaitu menyediakan perlengkapan persidangan, penyediaan notula untuk pembuatan laporan sesuai dengan rapat, dan semua hal diatas belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian dan mengambil suatu judul yaitu: "Upaya Mewujudkan Profesionalisme Kerja Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa".

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang umum disebut sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yang mana dalam penelitian deskriptif ini melakukan suatu kajian pada unsur yang akan menjadi bagian pokok dalam penelitian, yang dilakukan dengan sangat rinci agar dapat menyajikan suatu data yang akurat sesuai dengan keinginan, hal ini juga akan menggambarkan karakter dari peristiwa di lapangan tentang masalah penelitian.

Dalam penelitian kualitatif peneliti dan objek penelitian berbaur menjadi satu supaya persoalan penelitian dapat dengan segera diatasi, sasaran untuk penelitian itu adalah manusia sebagai sumber masalah serta menjadi objek dalam menyelesaikan masalah (Sarwono, 2006).

Kualitatif adalah metode penelitian yang sering digunakan untuk penelitian berbasis sosial masyarakat, sejarah, fungsional organisasi, serta hubungan kekeluargaan. Metode ini pastinya berbeda dengan kuantitatif (Ruslan, 2003)

Informan dapat diartikan sebagai tempat untuk mengambil informasi tentang kondisi dan situasi suatu latar penelitian. Informan tersebut yang dipilih oleh peneliti mampu untuk memberikan penjelasan secara terperinci mengenai latar penelitian dan secara informal dapat memberikan sumbangsi kepada peneliti untuk turut serta dalam melakukan penelitian (Moelong, 2014).

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan secara wawancara di barengi dengan teknik observasi dan dokumentasi.

Analisis data merupakan sebuah proses menyusun, mencari data yang diperoleh dari hasil penelitian yang berupa wawancara, jurnal lapangan, serta dokumentasi, dengan cara mengkategorikan data, menyusun dalam bentuk pola, mengelompokkan data, dijabarkan kedalam unit, memilah mana yang bisa untuk dipelajari serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012).

Untuk menganalisis data penulis membutuhkan kemampuan untuk mengelola data mentah agar

tersusun menjadi data yang akurat. Sehingga peneliti bisa menjawab permasalahan yang diajukan sebagai hasil di penelitian, dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif. Adapun tiga komponen utama tersebut antara lain reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan serta verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Upaya Mewujudkan Profesionalisme Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa

Dalam meningkatkan profesionalisme aparat, Sekretaris DPRD Kabupaten Mamasa harus memiliki berbagai upaya maupun strategi sehingga dapat tercapai arah dan tujuan Sekretariat DPRD Mamasa sekaligus untuk meningkatkan mutu Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa. Adapun upaya yang dilakukan dapat dilihat dari berbagai indikator – indikator profesionalisme kerja yaitu:

1) Kompetensi

Untuk mengetahui mengenai mengenai kompetensi tingkat keterampilan dan pengetahuan pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa, maka peneliti melakukan observasi. Dari hasil observasi dapat diketahui tingkat keterampilan dan pengetahuan Aparat di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa cukup baik. Peneliti melihat sudah baiknya tingkat keterampilan dan pengetahuan pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Mamasa yaitu Bapak Alexy Losong, S.STP., M.Si. Berikut adalah petikan wawancara penulis dengan beliau:

“Tingkat keterampilan dan pengetahuan Aparat di Sekretariat DPRD ini sudah baik, para aparat disini telah memiliki pengetahuan dalam bidangnya masing-masing. seperti pada Sub Bagian Humas dan Protokol Mereka telah mampu melaksanakan kinerja mereka dan hasilnya juga bagus. Begitu juga bagian Persidangan dan Risalah dan Bagian - Bagian yang lainnya. secara umum semua pegawai disini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup mumpuni dibidangnya walaupun tidak dipungkiri masih ada beberapa pegawai yang belum memahami tugas dan fungsi mereka di kantor”.

“Dalam hal peningkatan profesionalisme kerja aparat tentunya yang paling utama adalah meningkatkan kedisiplinan kerja aparat dan untuk meningkatkan mutu kerja pegawai, kami harus memberikan pendidikan atau Diklat kepada aparat agar supaya pengetahuan dan keterampilan mereka meningkat sehingga mereka dapat mengerjakan tugas mereka secara profesional walaupun mungkin hal tersebut kadang terkendala pada anggaran yang terbatas sehingga tidak semua aparat dapat mengikuti kegiatan yang dimaksud.” (wawancara, 16 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat penulis ambil kesimpulan bahwa Aparat yang ada di Sekretariat DPRD kabupaten Mamasa telah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik sehingga program-program yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa dapat berjalan dengan lancar dengan hasil yang maksimal.

Masalah kompetensi pegawai sangat penting bagi pegawai negeri sipil untuk menciptakan pegawai negeri yang profesional maka dalam rangka pembinaan karir yang lebih baik perlu adanya dilaksanakan diklat serta bimbingan teknis atau pelatihan yang menunjang kompetensi pegawai dalam hal ini yang berhubungan dengan uraian tugas pegawai agar dapat mewujudkan visi dan misi organisasi dalam hal ini organisasi pemerintah merupakan wadah pegawai negeri sipil.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa banyak para aparat yang masih belum mengikuti pendidikan dan pelatihan yaitu sebanyak 40 orang. Padahal pelatihan sangat berpengaruh baik terhadap peningkatan profesionalisme kerja aparat. Dari data di atas membuktikan bahwa meskipun pelatihan berpengaruh baik terhadap peningkatan profesionalisme kerja aparat tetapi pada kenyataannya banyak aparat di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa yang belum mengikuti pelatihan tersebut. Hal ini tentu akan mengakibatkan menurunnya tingkat profesionalisme kerja aparat dan pada akhirnya akan berdampak pada kualitas kerja yang dihasilkan.

Setelah banyaknya para pegawai yang tidak mengikuti diklat / Bimtek ternyata penempatan jabatan pegawai masih belum sesuai dengan keahlian dan spesifikasi pendidikan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa.

Dari hasil observasi dan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa secara keseluruhan indikator kompetensi terhadap upaya mewujudkan profesionalisme kerja aparat di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa yang penulis dapatkan termasuk dalam kategori Cukup Baik, dimana sudah ada beberapa aparat di Sekretariat DPRD yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Bimtek walaupun masih banyak aparat yang belum mengikuti kegiatan tersebut dan masih ada aparat yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahliannya (Spesifikasi pendidikannya).

2) Efektivitas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu Aparat yaitu kepala Bagian Keuangan Ibu Indra Wilyanti, AMKL. Beliau mengatakan:

“Kami bekerja disini berdasarkan program-program yang telah ditentukan sebelumnya, ada banyak program-program di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa yang kami kerjakan dan hasil kerja setiap bulannya mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala seperti anggaran yang diberikan tidak mencukupi dan juga sikap pegawainya yang terkadang menunda-nunda pekerjaan hingga hasil kerjanya melebihi waktu yang ditentukan. Tetapi secara umum hasil kerja di Sekretariat DPRD ini setiap bulannya mengalami peningkatan yang cukup baik”.

“Untuk meningkatkan kinerja aparat kita biasanya melakukan Bimtek untuk meningkatkan pengetahuan mereka, terutama itu para aparat yang di bagian Keuangan.” (wawancara, 24 Maret 2020)

Berdasarkan hasil observasi dilokasi penelitian, penulis melihat hasil kerja pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa masih kurang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat penulis ambil kesimpulan bahwa hasil kerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa mengalami peningkatan yang kurang baik. Selain itu juga dikarenakan adanya beberapa kendala yaitu seperti anggaran yang diberikan tidak mencukupi untuk membuat program lainnya karena anggaran yang ada sudah terpakai untuk program yang lain dan juga sikap pegawai yang masih menunda-nunda pekerjaan hingga hasil pekerjaannya melebihi waktu yang ditentukan sebelumnya.

Dari data yang diperoleh, maka dapat dijelaskan mengenai pencapaian target kerja pegawai dalam menyelesaikan program-program di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa. Dari seluruh program yang direncanakan semuanya terlaksana dengan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa mengenai hasil kerja aparat di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa pencapaian target kerja pegawai dalam menyelesaikan program-program dan berada pada penilaian baik.

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis ambil kesimpulan bahwa pencapaian target kerja pegawai dalam menyelesaikan program-program di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa kurang baik. Hal tersebut dapat di lihat pada wawancara di atas bahwa sewaktu program penataan perundang-undangan yang dilakukan Sekretariat DPRD tidak tepat waktu yang seharusnya selesai awal Mei tetapi selesai di bulan Juli. Hal tersebut tentu mengindikasikan kalau para pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa dalam penyelesaian program-program tidak memenuhi target waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya para pegawai yang menunda-nunda pekerjaan dan akibatnya program-program yang telah ditentukan sebelumnya tidak tepat waktu dan belum maksimal dalam penyelesaiannya.

Banyak cara atau banyak upaya yang dapat dilakukan dan harus ditempuh untuk meningkatkan profesionalisme kerja dalam suatu instansi pemerintahan. Profesionalisme kerja dapat ditingkatkan dengan baik jika pengawasan yang di lakukan oleh instansi pemerintahan itu maksimal. Efektivitas dan efisiensi dapat tercapai apabila hasil kerja yang dilakukan oleh para pegawai sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Maka dari itu pengawasan haruslah dilaksanakan dengan seefektif mungkin, karena pelaksanaan fungsi pengawasan dengan baik akan memberikan sumbangan yang besar pula dalam meningkatkan profesionalnya seorang pegawai.

Berdasarkan hasil observasi dilokasi penelitian, penulis juga melihat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Mamasa.

Dari hasil penelitian dapat penulis ambil kesimpulan bahwa masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Mamasa terhadap para pegawainya. Hal ini dapat dilihat dari kurang tegasnya Sekretaris DPRD dalam memberikan sanksi atas pelanggaran disiplin yang

dilakukan oleh para pegawai. Hal ini dikarenakan adanya hubungan pertemanan yang dekat antara kepala OPD dengan para pegawainya. Disamping itu juga dikarenakan sikap para pegawainya yang tidak mau di atur hingga mereka sering melakukan tindak indisipliner.

Selanjutnya mengenai alat-alat media yang dioperasikan oleh aparat di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa belum baik, sebagaimana hasil observasi dilokasi penelitian, penulis melihat masih banyaknya pegawai yang belum bisa mengoperasikan alat-alat media seperti komputer, printer dan alat-alat lainnya .

Setelah penggunaan alat-alat media dan juga adanya kemampuan dan integritas pegawai dalam meningkatkan derajat profesionalismenya, maka selanjutnya yaitu diperlukannya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dimana keberhasilan suatu unit kerja dalam mengemban tugas sangat ditentukan oleh alat pendukung sarana dan prasarana yang memadai.

Dari hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa secara keseluruhan indikator efektivitas terhadap upaya mewujudkan profesionalisme kerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa termasuk dalam kategori cukup baik.

3) Efisiensi

Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa, aparat masuk kantor pada pukul 07:30 WIB dan berakhir pada pukul 16:00 WIB. Sedangkan untuk jam istirahat siang yaitu pada pukul 12:00- 13:00 dan khusus untuk hari jumat istirahat siang pada pukul 11:30- 14:00.

Berdasarkan hasil observasi dilokasi penelitian, penulis juga melihat masih kurangnya disiplin waktu yang dilakukan oleh para pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa. Hal ini dibenarkan juga oleh Ibu Elisabeth, SE selaku Anggota DPRD berikut adalah petikan wawancara penulis dengan beliau:

“Aparat disini banyak yang belum disiplin, kadang datang terlambat, keluar pada saat jam kerja, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi yang ada dan bahkan pulang sebelum waktunya”.(wawancara, 27 Maret 2020)

Dari petikan wawancara tersebut dapat penulis ambil kesimpulan bahwa masih kurangnya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme kerja aparat pada indikator disiplin waktu yang dilakukan oleh para pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya para pegawai yang masih keluyuran pada saat jam kerja berlangsung. Kurang disiplinnya pegawai ini dikarenakan sanksi dan pengawasan yang masih lemah. Hal tersebut tentu mendorong para pegawai keluyuran pada saat jam kerja, ke kantin, warung kopi dan juga pulang sebelum jam kerja. Padahal itu akan bertentangan sekali dengan kode etik Korps Pegawai (korpri) yang disebutkan bahwa setiap anggota Korps Pegawai Republik Indonesia menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalismenya.

4) Tanggung jawab

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa tanggung jawab pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa dalam melaksanakan pekerjaan belum berjalan dengan baik, dimana masih ada sebagian pegawai menunda tanggung jawab karena ada pekerjaan di luar kantor. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Orsan Soleman B, ST selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamasa mengatakan bahwa:

“Berbicara masalah tanggungjawab aparat dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan, aparat di Sekretariat DPRD masih kurang efektif. Dimana, masih ada aparat yang menunda-nuda pekerjaan mereka, kadang saling melempar tanggungjawab terhadap suatu kegiatan dan masih lebih mengutamakan pekerjaan atau urusan mereka yang ada diluar kantor.” (Wawancara, 30 Maret 2020)

Hal tersebut tentu akan mengakibatkan tugas, pokok dan fungsinya dalam menjalankan pekerjaan akan tertunda. Para pegawai sudah tahu akan tanggung jawabnya terhadap pekerjaan yang diberikan tetapi dalam prakteknya masih kurang kesadaran pegawai dalam hal menghargai waktu dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara.

Selain itu, pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa masih melimpahkan tanggung jawabnya kepada pegawai lain yang lebih junior, kepada pegawai yang masih honor dan juga kepada para siswa/siswi magang. Meskipun hasil pekerjaan yang dilimpahkan kepada orang lain tersebut cukup baik tetapi hal ini tentu akan mengakibatkan seringnya pegawai melimpahkan pekerjaannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Maspri selaku Aparat di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa yang mengatakan bahwa:

“Kami aparat yang masih junior / aparat yang masih baru seringkali dilimpahkan pekerjaan yang bukan bagian dari tugas kami tetapi tugas yang harus dikerjakan oleh aparat yang lain yang lebih senior padahal kami juga punya beban tugas tersendiri. Itulah yang kadang menghambat pekerjaan kami. Jadi kami kadang bekerja tidak sesuai dengan tupoksi.”

“Upaya yang dilakukan itu adalah meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan aparat dengan cara mengikuti diklat, pendisiplinan dan adanya pengawasan dari pimpinan.” (Wawancara, 31 Maret 2020)

Hal ini tentu sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil yaitu tentang pentingnya tanggung jawab pegawai dalam menjalankan pekerjaan tanpa melimpahkannya kepada orang lain.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profesionalisme Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa

Setiap pelaksanaan dalam rangka peningkatan profesionalisme kerja pegawai selalu ada kendala-kendala di dalam pelaksanaannya sehingga pelaksanaan tugas pelayanan tersebut tidak berjalan dengan baik. Untuk mencapai suatu keberhasilan atau kesuksesan bukanlah hal yang mudah, meskipun

segala urusan tersebut dilaksanakan semaksimal mungkin. Tetapi tetap saja akan dihadapi kendala atau hambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi begitu juga halnya dengan profesionalisme kerja aparat di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan pembahasan di atas penulis mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme kerja aparat di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa yaitu:

1) Pendidikan dan pelatihan

Pegawai negeri sipil yang profesional yaitu pegawai yang mempunyai kualitas tinggi memiliki kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan tugas yang dibebarkannya dengan baik. Selain itu juga mereka mempunyai mental yang baik, berwibawa, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah. Untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil tersebut, berbagai macam cara dan pembinaan terus menerus dilaksanakan, salah satu diantaranya melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan yang mengarah kepada peningkatan kepribadian, mutu dan kemampuan, baik dalam bidang substansi maupun kepemimpinannya dan dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja. Dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa, minat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih rendah di mana masih ditemukannya para pegawai yang belum melakukan pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan hasil observasi dilokasi penelitian, penulis juga melihat masih adanya pejabat struktural yang belum melakukan diklat kepemimpinan hal ini juga dibenarkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Mamasa yaitu Bapak Alexy Losong, S.STP., M.Si. berikut adalah petikan wawancara penulis dengan beliau:

“Seperti yang kita lihat pada laporan penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa tahun 2019 memang ada beberapa pegawai yang belum melakukan diklat kepemimpinan dalam jabatan struktural ada 9 orang dan untuk staf masih banyak yang belum dapat mengikuti Bimtek dikarenakan anggaran yang terbatas”. (wawancara, 16 Maret 2020)

Berdasarkan wawancara dan observasi tersebut tentu dapat kita lihat bahwa diklat kepemimpinan juga menjadi faktor dasar mengapa rendahnya profesionalisme kerja aparat di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa. Padahal diklat tersebut sangat penting dalam membentuk profesionalisme kerja pegawai.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps PNS yang didesain pemerintah agar PNS itu kuat, kompak, bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, disiplin, serta sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur PNS.

2) Penempatan pegawai

Dengan adanya penempatan kerja yang sesuai dengan kompetensi tentu akan meningkatkan profesionalisme kerja pegawai tersebut. Tetapi dalam hal ini di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa masih ditemukannya penempatan pegawai yang tidak

sesuai dengan kompetensi, dimana para pegawai yang menjabat tidak sesuai dengan tingkat keahliannya.

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa Tallu lulusan S2 tetapi jurusan Pendidikan memegang jabatan Kabag Umum, selain itu juga Novia Triwati Lulusan S1 jurusan Pendidikan memegang jabatan sebagai Kasubag Verifikasi, Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil lembar observasi penelitian, mengenai aspek penempatan jabatan pegawai selalu dengan keahlian dan spesifikasi pendidikan masih tidak sesuai dengan kompetensi, dimana para pegawai yang menjabat tidak sesuai dengan tingkat keahliannya.

Hal tersebut tentu akan mengakibatkan rendahnya kemampuan dan kualitas pegawai dalam menjalankan tupoksinya. Sementara itu disisi lain juga karena bidang tugasnya tidak terlalu di kuasai, hal ini secara umum akan berdampak pada kinerja pegawai yang tidak menjadi efektif dan efisien.

3) Pengawasan

Pengawasan sangat penting oleh pimpinan antara lain adalah untuk terciptanya mekanisme keseimbangan dan pengawasan dua arah terhadap kinerja masing masing individu dalam organisasi. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Mamasa terhadap para pegawai mengakibatkan rendahnya tingkat profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai abdi masyarakat dan negara.

Berdasarkan hasil observasi dilokasi penelitian, penulis juga melihat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Orsan Soleman B, ST berikut adalah petikan wawancara penulis dengan beliau:

“setiap kami dan Pimpinan di Sekretariat DPRD ada kegiatan diluar para aparat banyak yang tidak ditempat, hanya ada beberapa saja, hal ini karena pengawasannya yang lemah. Sekretaris DPRD masih kurang tegas seharusnya ada pegawai yang tidak disiplin sering keluar harus ditindak tegas tanpa ampun meskipun itu saudara atau teman dekat. Apalagi sewaktu Sekretaris DPRD beserta pejabat struktural keluar kota atau ada pelatihan pasti para pegawai disini banyak yang tidak masuk kantor, datang terlambat, atau mereka masuk kantor tapi hanya bercerita tidak melaksanakan tugas, bahkan ada yang pulang sebelum waktunya. (wawancara, 30 Maret 2020)

Dari petikan wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD kepada para pegawainya mempengaruhi tingkat profesionalitas pegawai dalam bekerja. Pengawasan yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD tidak efektif dimana sanksi yang diberikan pada pegawai hanya berupa teguran semata tanpa sanksi yang berat. Sehingga banyak pegawai melakukan tindakan indisciplinernya berulang kali. Bahkan juga terkadang kepala dinas tidak memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya seperti datang terlambat tidak sesuai dengan jam masuk kantor yaitu pada pukul 07:30 WIB.

4) Disiplin waktu

Disiplin waktu sangat berpengaruh penting dalam mempengaruhi profesionalisme kerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa dimana banyak para pegawai yang tidak disiplin.

Berdasarkan hasil lembar observasi penelitian, disiplin waktu yang dilakukan oleh para pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa masih kurang baik. Hal ini dibenarkan juga oleh Ibu Elisabeth, SE, berikut adalah petikan wawancara penulis dengan beliau:

“Aparat disini banyak yang belum disiplin, kadang datang terlambat, keluar pada saat jam kerja, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi yang ada dan bahkan pulang sebelum waktunya”.(wawancara, 27 Maret 2013)

Kurang disiplinnya pegawai ini dikarenakan sanksi dan pengawasan yang masih lemah. Hal tersebut tentu mendorong para pegawai keluyuran pada saat jam kerja, ke kantin, warung kopi dan juga pulang sebelum jam kerja. Padahal Pada Sekretariat DPRD untuk jam masuk kantor yaitu pada pukul 07:30 WIB dan berakhir pada pukul 16:00 WIB. Sedangkan untuk jam istirahat siang yaitu pada pukul 12:00- 13:00 dan khusus untuk hari jumat istirahat siang pada pukul 11:30- 14:00.

5) Tanggung Jawab Pegawai

Seorang pegawai yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan tercermin dalam sikap tanggung jawab serta komitmennya dalam bekerja. Berdasarkan hasil lembar observasi penelitian, dengan aspek tanggung jawab pegawai dalam menjalankan tugasnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa masih kurang baik.

Tanggung jawab para pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa masih rendah dimana dalam hal penyelesaian pekerjaan sering menunda-nunda dan hasil pekerjaannya melebihi target yang ditentukan. Selain itu juga dalam hal sikap pegawai yang tidak mencerminkan profesional dimana banyak dari mereka yang keluar di saat jam kerja berlangsung, sehingga para pegawai tidak mempunyai dedikasi yang tinggi, berupa kebanggaan kepada pekerjaan, ikhlas dan rasa tanggung jawab. Mereka hanya mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum.

4. SIMPULAN

Profesionalisme kerja Aparat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa masih sangat kurang hal ini dikarenakan sikap dan perilaku pegawai itu sendiri seperti adanya pegawai yang melanggar aturan, terlambat masuk kerja padahal sudah ditetapkan bahwa jam masuk 07:30-16:00 WIB, merokok diruangan kerja, menunda-nunda pekerjaannya karena ada urusan diluar, Di samping itu juga banyak para pegawai yang tidak disiplin, melimpahkan tanggung jawab pekerjaannya kepada pegawai yang lebih junior.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan yang diperoleh penulis dari wawancara dan observasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa tentang “Upaya Meningkatkan Profesionalisme Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat DPRD Kabupaten

Mamasa” masih termasuk kurang baik, dimana dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme kerja Aparat yaitu:

a. Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan .

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya profesionalisme kerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa. Hal ini dapat terlihat bahwa masih ditemukannya pegawai dalam jabatan struktural yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan juga masih banyaknya pegawai yang belum pernah mengikuti bimtek atau pelatihan kerja yang dapat meningkatkan pengetahuan kerja aparat.

b. Penempatan pegawai.

Penempatan aparat di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa masih ada yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

c. Pengawasan.

Lemahnya Pengawasan yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya profesionalisme kerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa.

d. Disiplin waktu.

Disiplin waktu sangat berpengaruh penting dalam mempengaruhi rendahnya profesionalisme kerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa dimana banyak para pegawai yang tidak disiplin seperti datang terlambat, keluyuran pada saat jam kerja, pulang kerja sebelum waktunya dan tindakan indisipliner lainnya.

e. Tanggung jawab Pegawai.

Sikap tanggung jawab pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa masih rendah dimana dalam hal penyelesaian pekerjaan sering menunda-nunda dan hasil pekerjaannya melebihi target yang ditentukan, tidak memahami tugas dan fungsi di kantor dan sering melempar pekerjaan kepada pegawai lainnya.

Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sedarmayanti, 2010, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, PT. Refika Aditama: Bandung

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007

DAFTAR PUSTAKA

Andreas Harefa. 2004. *Membangkitkan Etos Profesionalisme*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

A.W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali.

Hamalik Oemar. 2000. *Pengembangan Sumber Daya Manusia, Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan, Pendekatan Terpadu*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta

J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kurniawan Agung, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan: Yogyakarta

Peter Salim dan Yeni Salim, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Press.